



PENYEBAB KURANG TERWUJUDNYA PENGARUH *CONSTRUCTIVE ENGAGEMENT* BALI DEMOCRACY FORUM TERHADAP PROSES TRANSISI DEMOKRATIS MYANMAR

Satrio Adjinegoro, Ika Riswanti Putranti, Marten Hanura

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Sudarto, SH, Tembalang, Kota Semarang

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024)7465407

Website: <https://fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Myanmar's military regime, namely Tatmadaw, has taken over political influence for a lengthy amount of time, whether directly or indirectly. On the 1st February 2021, Tatmadaw launched a coup to once again take over leadership after denouncing the election results won by the National League for Democracy. With Tatmadaw back in leadership, democratization in Myanmar not only regressed, but also proved difficult to return to its original state. Additionally, Myanmar still has not been fully democratic even though it has participated in the Bali Democratic Forum because of Tatmadaw's large dominance. After the coup was launched in 2021, Myanmar was not invited to BDF's 14th meeting.

This research will explain the effects of BDF'S Constructive Engagement on Myanmar's democratic transition process. This research will use qualitative and explanative methods, which means that it will answer the research question using narrations and relevant data. This research will also use Darren Hawkins' theory of democratization with the assistance of Huntington and McFaul. By using these theories, the answer found is that the effects of BDF on Myanmar's democratic transition have not manifested because most of BDF's recommendations are aimed towards the governments, but not towards the civil society.

Key Words: Myanmar, BDF, Tatmadaw, Democracy, Coup

PENDAHULUAN

Rezim militer dapat didefinisikan sebagai sistem pemerintahan yang terdiri dari bagan militer atau memiliki militer sebagai bagian dari pemerintahan tersebut. Bagan militer dalam sistem pemerintahan tersebut memainkan peran yang dominan, terutama dalam pembuatan kebijakan (Bünthe, 2011). Di Myanmar, rezim militernya dimanakan Tatmadaw. Rezim tersebut memiliki kekuasaan yang besar dalam politik Myanmar. Hal tersebut berkat adanya kudeta (*coup*) pada tahun 1962. Tatmadaw berhasil menjadi aktor terkuat di Myanmar berkat kemampuannya untuk berintervensi dalam banyak aspek, mendukung junta untuk mengisolasi Myanmar, dan menggunakan cara-cara kekerasan dalam menghadapi kelompok oposisi. Selain kewenangan

yang sangat besar pada Tatmadaw, kemampuan Myanmar untuk mendemokraskan diri juga masih sangat tidak memungkinkan. Contoh dari hal tersebut terdapat pada konstitusi 2008 yang membuat warga tidak berdaya melawan rezim militer dan menyatakan posisi Tatmadaw dalam perpolitikan Myanmar. Pada Konstitusi tahun 2008, militer dapat berpartisipasi dalam kepemimpinan politik Myanmar dengan menempati kursi parlemen yang telah disediakan, yaitu sebanyak 25% dari jumlah kursi (Barany, 2019 hal.9).

Dengan kekuasaan Tatmadaw yang kuat dan praktisi militernya yang sulit dikontrol, keamanan dan demokrasi Myanmar sulit terwujud. Bahkan dengan kemenangan partai *National League for Democracy* (NLD), pemimpin partai dan pemimpin *de facto* Aung San Suu Kyi tidak dapat memimpin Myanmar dengan baik dan tidak dapat menurunkan kekuasaan Tatmadaw (Barany, 2019). Dengan kesulitan yang dihadapi Suu Kyi dan kekuasaan Tatmadaw yang sangat besar, demokrasi akan sulit terwujud.

Tentara Myanmar telah seringkali melakukan tindak kekerasan terhadap warga, salah satunya terhadap warga Rohingya. Alasannya adalah warga Rohingya dianggap bukan warga asli Myanmar. Memang harus diakui bahwa pada tahun 2017 Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA), sebuah kelompok militan Rohingya, melakukan serangan pada instalasi keamanan di Rakhine Utara. Namun aksi tersebut dibalas tentara Myanmar dengan sangat berlebihan dan tidak setimpal sehingga mengakibatkan jatuhnya banyak korban. Lebih jelasnya, Tatmadaw menggunakan metode yang tidak manusiawi, seperti penyiksaan, pemerkosaan, dan pembakaran rumah warga. Serangan ARSA tersebut digunakan Tatmadaw sebagai alasan untuk semakin gencar menekan dan melakukan tindak kekerasan terhadap Rohingya. Menurut Zoltan Barany (2019), memang terdapat siklus serangan yang terjadi antara warga Rohingya dan Tatmadaw yang telah berlangsung dari perang dunia II sampai sekarang. Dengan pemberlakuannya yang tidak setimpal, banyak warga Rohingya yang melarikan diri dari Myanmar ke Bangladesh. Myanmar mengatakan bahwa warga Rohingya merupakan “Alien dari Bengal” dan tidak berhak untuk mendapatkan kewarganegaraan.

Contoh lain dari kekerasan Tatmadaw adalah kebijakannya untuk melakukan kudeta, mendeklarasikan kondisi darurat (*State of Emergency*), dan kembali memegang kekuasaan penuh pada tanggal 1 Februari 2021 lalu (The New York Times, 2021). Peristiwa ini dimulai dengan kemenangan partai the National League for Democracy pada pemilu parlemen pada tanggal 8 November 2020. Dengan mengklaim bahwa pemilu yang telah diadakan mengandung kecurangan, pasukan Tatmadaw menangkap para politisi pro-demokrasi,

termasuk Aung San Suu Kyi, dan menyerukan *State of Emergency*. Warga merespon dengan mengadakan protes yang menyerukan demokrasi pembebasan para politikus yang tertangkap. Untuk menghadapi gerakan protes yang dilakukan warga Myanmar, Tatmadaw merespon kembali dengan membunuh para warga yang berprotes secara damai. Semakin lama protes tersebut berjalan, serangan dari Tatmadaw juga semakin brutal dan membuat Myanmar mengalami perang sipil.

Untuk mencoba mempersuasi ide demokrasi ke Myanmar, salah satu negara ASEAN, Indonesia melakukan *Constructive Engagement* dengan mengundang Myanmar ke Bali Democracy Forum (BDF). BDF sendiri merupakan forum internasional *intergovernmental* yang berdiskusi mengenai demokrasi di wilayah Asia-Pasifik. Menurut Rahman (2017), tujuan berdirinya BDF adalah untuk menyebarkan nilai demokrasi di wilayah Asia. Hal ini sejalan dengan yang dinyatakan Edwein Satya saat wawancara.¹

Indonesia sebagai negara penyelenggara BDF menekankan beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat mengembangkan demokrasi. Berdasarkan pernyataan di atas, BDF percaya bahwa demokrasi harus berkembang dari inisiatif sendiri dan berdasarkan kondisi historis dan kebudayaan masing-masing. Selain itu, BDF menyuarakan demokrasi dengan cara berdialog dan menunjukkan keunggulan dari demokrasi berdasarkan pengalaman masing-masing negara partisipan. Dan juga, BDF mendorong para partisipan untuk dapat belajar dari sesama mengenai *good governance* dengan menjunjung tinggi inklusivisme dan pluralisme. Menurut Edwein Satya sebagai mantan petugas, BDF berharap bahwa dengan bergabungnya negara-negara dalam BDF, para partisipan dapat perlahan-lahan membuka diri dan menerapkan demokrasi di negaranya. Hal ini selaras dengan pernyataan Khanisa Krisman sebagai Koordinator Tim Kajian ASEAN Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2017 mengenai keinginan Indonesia dalam mengundang Myanmar untuk memenuhi tujuannya (Dalam Rahman, 2017)

BDF juga berusaha untuk mengedepankan demokrasi dengan harapan dapat membantu para partisipannya dalam menghadapi masalah yang sedang melanda anggota atau global. Edwein Satya juga mengatakan bahwa BDF mendasarkan tema diskusinya dengan 3 pilar yang sesuai dengan piagam PBB. Pilar pertama terkait politik and *economic development*. Kedua mengenai *peace and security*, dan ketiga mengenai isu humanitarian. Tema diskusi setiap tahun juga

¹ Hasil Wawancara dengan Edwein Satya sebagai Mantan petugas BDF dalam Fungsional Diplomat pada Sub Direktorat Politik dan Keamanan di Direktorat Diplomasi publik pada tanggal 21 Februari 2022

mempertimbangkan perkembangan zaman dan masalah yang melanda dunia. Ia juga mengatakan bahwa sesuai dengan 3 pilar sebelumnya, isu-isu tersebut menurut sudut pandang banyak negara lebih tepat jika dijalankan atau ditangani melalui sistem demokrasi. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa BDF menyuarkan demokrasi karena dianggap cara yang terbaik untuk menyelesaikan isu atau masalah yang melanda dunia.

Tetapi walaupun BDF percaya demokrasi dapat meningkatkan partisipasi dalam pemerintahan dan *decision-making* yang inklusif, BDF tidak dapat memberikan jaminan bahwa demokrasi akan lebih efektif atau akan memberikan perkembangan yang lebih baik:

“The process of mutual learning and sharing of experience would further vet the nature of democracy as a unifying factor. Also, democracy may foster a more participatory and inclusive decision-making processes, this does not mean that they are more effective. It is stated that there is no substantial guarantee that democracy could surely lead to better developmental outcomes, whether in terms of stability, prosperity and anything else.” (BDF, *Why BDF*)

Metode yang dilakukan BDF tersebut berbeda dengan cara negara-negara barat yang memberikan sanksi dan isolasi, dan hanya akan melegakan sanksi dan merayakan Myanmar jika telah melakukan kemajuan demokratis (Comply Advantage, Tanpa Tahun)(Politico Magazine, 2014). Hassan Wirajuda, perdana menteri RI periode 2001-2009 dan pelopor BDF, mengatakan bahwa BDF telah diikuti oleh negara dengan berbagai rezim, baik “demokrasi, separuh demokrasi, dan junta militer” (Republika, 2016). Tetapi walaupun Myanmar memiliki rezim junta militer, Myanmar masih diundang, menjadi partisipan, dan telah mendatangi setiap pertemuannya dari tahun 2008 sampai 2014 (Aryani 2019: 5). Tetapi pada tahun 2021, pada saat BDF mengadakan pertemuan ke-14, Myanmar tidak diundang karena “ada ketidakjelasan siapa yang bisa diundang”, bilang Teuku Faizasyah sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri RI kepada pada hari Senin, 6 Desember 2021 (Tempo, 2021).

Paragraf-paragraf selanjutnya akan menjelaskan mengenai penelitian-penelitian sebelumnya mengenai topik yang serupa. Beberapa literatur di bawah mengatakan bahwa *Constructive Engagement* merupakan cara yang tepat dan efektif untuk mendorong upaya demokratisasi Myanmar. Menurut Cheak (2008) *Constructive Engagement* sudah bagus dalam menjaga Myanmar dari kritik dunia luar dan harus tetap dilanjutkan. Tetapi, penelitiannya juga mengatakan bahwa *Constructive Engagement* perlu peningkatan untuk dapat mempengaruhi dan mempersuasi Myanmar secara efektif. Kemudian, Erin McAuliffe (2014) mengatakan

bahwa *Constructive Engagement* merupakan cara ASEAN untuk meliberalisasi Myanmar dan menjadikan Myanmar sebagai anggota ASEAN. Cara ini juga digunakan sebagai alternatif dari cara-cara negara Barat seperti pemberian sanksi dan isolasi. McAuliffe juga menjelaskan bahwa Myanmar dapat membawa masalah legitimasi pada ASEAN sebagai organisasi regional yang *legitimate* karena tidak sepenuhnya menganut sistem demokrasi.

Mengenai demokratisasi, beberapa peneliti setuju bahwa militerisasi dan pendekatan dari sudut pandang militer akan membuat demokratisasi lebih sulit. Sebagai contohnya adalah Downes dan Monten (2013) yang mengatakan bahwa intervensi militer memiliki pengaruh yang sedikit terhadap demokratisasi sebuah negara. Selain itu, penelitian ini juga mengatakan bahwa kegagalan demokratisasi disebabkan oleh perencanaan kebijakan yang tidak tepat sasaran dan tidak adanya prakondisi yang sesuai untuk menegakkan demokrasi. Upaya demokratisasi juga harus didampingi oleh reformasi institusional agar dapat mengubah rezim secara efektif. Kemudian menurut Croissant *et al* (dalam Bünte 2011), dengan bagan militer sebagai pemeran utama dalam pembuatan kebijakan, demokratisasi akan sulit karena memerlukan pengendalian dari masyarakat (*Civilian Control*). Ini dikarenakan kendali dari masyarakat, atau lebih tepatnya kekuasaan rakyat, merupakan syarat yang penting agar demokratisasi dapat terjadi.

Secara keseluruhan, literatur-literatur di atas mengatakan bahwa *Constructive Engagement* merupakan cara yang tepat untuk mendorong demokratisasi Myanmar. Tetapi secara garis besar, hasil dari demokratisasi tersebut masih belum termanifestasi dan masih belum ada perubahan mengenai demokrasi di Myanmar. Berdasarkan riset dari peneliti, kesulitan dalam demokratisasi Myanmar tidak hanya terdapat pada *Constructive Engagement* itu sendiri. Masalah tersebut justru lebih pada masalah domestik Myanmar sendiri sebagai negara yang menggunakan rezim militer. Dengan kuatnya rezim militer, dan ketidak inginan untuk turun dari kekuasaan, akan sangat sulit bagi Myanmar untuk menjadi negara yang sepenuhnya demokratis. Komitmen politik dari para penguasa militer untuk secara bertahap menuju ke arah rezim demokratis amat penting. *Constructive Engagement* memang memberikan alternatif dalam cara berinteraksi dan mendorong sebuah negara untuk melakukan transisi dan liberalisasi. Tetapi dengan masih kuatnya Myanmar sebagai rezim militer yang hanya menunjukkan sedikit upaya untuk berubah, maka efektivitas dari *Constructive Engagement* terhadap Myanmar akan dipertanyakan. Tentunya sudah menjadi rahasia umum bahwa keberlangsungan rezim militer Myanmar akan sangat menguntungkan penguasa militer, tidak hanya secara politis tetapi juga ekonomis. Banyak sekali perusahaan-perusahaan dan kegiatan bisnis di Myanmar yang dikendalikan oleh militer baik sebagai institusi maupun oleh para

petinggi militer secara pribadi. Apabila proses demokratisasi terus berlanjut, dikhawatirkan keuntungan politik dan bisnis tersebut akan semakin tergerus.

Selain itu, literatur-literatur di atas telah membahas hubungan antara *Constructive Engagement* dan demokratisasi dari berbagai aspek dan pandangan yang berbeda, baik dari sisi teoritis, maupun dari hasil dan argumen penelitian. Tetapi literatur-literatur di atas belum memberikan penjelasan yang konkrit mengenai pengaruh *Constructive Engagement* pada demokratisasi Myanmar. Untuk menjawab hal tersebut penelitian ini akan menggunakan teori yang berbeda, yaitu teori demokratisasi oleh Darren Hawkins (2001) dengan bantuan teori dari Huntington (1991) dan McFaul (2002). Teori ini akan mengambil beberapa aspek yang menandakan demokrasi untuk menilai upaya demokratisasi pada suatu negara. Selibhnya akan dijelaskan lebih lanjut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan bersifat eksplanatif. Tipe penelitian ini digunakan untuk memahami dan menjelaskan mengapa Myanmar belum sepenuhnya demokratis walaupun mengikuti BDF. Selain itu, Penelitian ini akan bersifat kualitatif. Secara garis besar penelitian ini akan menggunakan data-data yang bersifat teks seperti dokumen-dokumen, berita-berita, dan laporan-laporan yang menggambarkan realita yang disampaikan pada literatur-literatur tersebut. Kemudian, data-data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan atau *library research*. Menurut Nazir (2003), Studi kepustakaan merupakan metode penelitian yang menggunakan cara mengadakan penelaahan pada sumber-sumber yang memiliki hubungan dengan masalah yang ingin dipecahkan atau dijawab. Teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif Analisis. Menurut I Made Winartha:

“Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan”
(Wirartha, 2006)

Teknik ini digunakan karena dapat mempermudah penjelasan dan menjawab rumusan masalah dengan cara terlebih dahulu mengilustrasikan data-data yang telah dikumpulkan. dan kemudian memberikan penjelasan berdasarkan ilustrasi tersebut. Selain itu, metode ini akan digunakan untuk mencoba memberikan gambaran guna memahami kekuasaan rezim militer Myanmar dan menjelaskan mengapa Myanmar masih belum sepenuhnya demokratis walaupun mengikuti BDF. Juga akan dianalisa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan rezim militer

dalam menjaga kekuasaannya. Tantangan dalam penelitian ini adalah tidak hanya mengamati rezim militer dalam menjaga kekuasaannya, namun juga untuk menjelaskan sulitnya menegakkan demokrasi di Myanmar.

KERANGKA PEMIKIRAN

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori demokratisasi dari penelitian Darren Hawkins (2001) dengan bantuan teori demokratisasi dari Huntington (1991) dan McFaul (2002). Hawkins tidak menyatakan secara eksplisit definisi demokrasi (objek dari demokratisasi) yang dimaksud. Karena itu, penelitian ini akan mencoba mendefinisikan demokrasi berdasarkan Robert Dahl. Ia mengatakan bahwa demokrasi merupakan: “*A political system one of the characteristics of which is the quality of being completely or almost completely responsive to all its citizens.*” (Dahl, 1971: 2). Ia juga mendefinisikan demokrasi sebagai sebuah poliarki. Hal tersebut dikarenakan dalam demokrasi terdapat tingkat persaingan (contestation) umum dan partisipasi yang tinggi dalam pemerintahan, dan merepresentasikan demokratisasi. Selain itu, ia juga menganggap demokrasi sebagai poliarki karena ia tidak percaya bahwa tidak ada demokrasi yang sempurna atau *fully democratic* (Dahl, 1971).

Dahl juga pernah membahas sedikit mengenai transformasi demokratis dalam karyanya *Democracy and Its Critics* (1989). Ia mengatakan bahwa bahwa proses demokratis dan tantangannya terpengaruh oleh sejarah dan struktur sosial sebuah masyarakat. Kemudian pandangan Dahl mengenai transformasi lebih berfokus pada cakupan perubahan demokrasi, atau transformasi dan proses demokratis, daripada gelombang demokratisasi internasional. Pada transformasi pertama, demokrasi berfokus pada cakupan *city-state*. Kemudian pada transformasi kedua, cakupan demokrasi berkembang dan berfokus pada *nation-state*. Dan pada transformasi ketiga, perkembangan demokrasi justru berfokus pada aspek yang penting bagi demokrasi, seperti kesetaraan ekonomi dan moralitas profesional (Giri, 1996: 2154). Ia juga memberikan ide mengenai bagaimana nilai demokrasi dapat terus disebar. Yaitu dengan “menduplikasikan transformasi kedua dalam cakupan yang lebih besar: dari demokrasi dalam *nation-state* menjadi demokrasi di negara transnasional” (Dahl, 1989: 320).

Sebagai tambahan, Downes dan Monten (2013) telah meneliti mengenai demokrasi yang didorong dari pihak luar, terutama dengan kekuatan militer. Downes dan Monten mengambil contoh intervensi Amerika Serikat pada beberapa negara dengan harapan dapat membawa demokrasi. Berdasarkan penelitian mereka, intervensi militer memiliki pengaruh yang sedikit

terhadap demokratisasi sebuah negara. Mereka juga menekankan pentingnya kondisi domestik negara, dan reformasi institusi serta pemerintahan ke arah yang demokratis pada sasaran demokratisasi agar perubahan rezim dapat berjalan dengan lancar. Mereka juga menyatakan bahwa Dahl pernah mengatakan bahwa “pada tahun 1970, sebagian besar negara yang menjalankan demokrasi pernah setidaknya menjadi sasaran demokratisasi dengan militer dari luar sejak kemerdekaan” (Downes dan Montan, 2013: 97). Downes dan Montan juga mencatat dari Huntington mengenai demokratisasi, seperti pentingnya kondisi negara dalam demokratisasi dan peran militer dalam perubahan rezim (Downes dan Montan, 2013).

Teori demokratisasi oleh Hawkins (2001) merupakan perkembangan dari penelitian yang dilakukan Diamond, Linz, and Lipset (1989, dalam Hawkins, 2001: 442). Penelitian sebelumnya telah memberikan 49 proposisi teoritis yang mempengaruhi transisi demokratis, yang kemudian disimpulkan menjadi 10 dimensi teoritis mengenai transisi demokratis. Penelitiannya menggunakan beberapa kasus demokrasi, seperti Indonesia, Meksiko, Chile, dan Nigeria yang merupakan negara otoritarian pada waktu publikasi. (Hawkins, 2001: 443).

Lalu mengenai penelitian Diamond, Linz, dan Lipset (1989, dalam Hawkins, 2001) memiliki kelemahan, yaitu tidak menggunakan contoh kasus negara mengalami kegagalan demokratisasi dan negara yang memiliki sistem pemerintahan otoriter yang stabil. Hawkins juga tidak setuju dengan penelitian Diamond, Linz, dan Lipset bahwa tekanan struktural akan membawa demokrasi. Hawkins juga sejalan dengan pemikiran Karen Remmer (1991: 485) yang mengatakan bahwa pembelajaran demokratisasi terlalu berfokus pada proses demokratisasi suatu negara daripada membandingkan penyebab dan konsekuensi dari perubahan rezim. Untuk menanggapi kegagalan tersebut, ia mencoba untuk menggunakan Kuba sebagai contoh kasus negara yang belum dapat melakukan demokratisasi. Untuk membuktikan bahwa faktor-faktor lain seperti keberadaan kelompok sosial dan *soft-liners* yang Kuba tidak miliki merupakan penyebab utama gagalnya demokratisasi di Kuba.

Mengutip dari Remmer (1991), Darren Hawkins memandang bahwa kelemahan dari penelitian mengenai demokratisasi adalah bahwa demokratisasi dipandang sebagai kumpulan dari variabel dan proporsi yang abstrak:” *Viewed in aggregate, democratization theory resembles "an inchoate shopping list of variables and complex proposition"*. Tetapi ia tetap menggunakan metode ini untuk membandingkan Kuba sebagai negara yang belum dapat melakukan demokratisasi.

Menurut Darren Hawkins (2001), hasil akhir dari demokratisasi dapat dibagi menjadi 2: transisi ke negara yang demokratis atau penetapan sebagai negara yang otoritarian. Berlandaskan kegagalan penelitian sebelumnya, Darren Hawkins merekomendasikan pengguna teori demokratisasi untuk juga mengupas kasus pada saat demokratisasi mengalami kegagalan. Ini dikarenakan kasus kegagalan tersebut akan memberikan gambaran yang lebih variatif mengenai gerakan demokratisasi itu sendiri. Hasil yang variatif tersebut akan memberikan perkembangan dalam penggunaan teori demokratisasi. Jika hasilnya sama pada semua kasus, maka akan menyebabkan generalisasi dan *versatility* dari teori ini akan menurun. Myanmar sebagai negara yang belum sepenuhnya demokratis merupakan salah satu contoh kasus yang tepat menurut teori demokratisasi. Karena itu, teori demokratisasi oleh Darren Hawkins (2001) cocok untuk menganalisis demokratisasi Myanmar.

Teori Demokratisasi oleh Huntington (1991)

Huntington (1991: 17-18) telah mengamati gelombang demokrasi sampai akhir abad ke-20. Dari pengamatan tersebut, telah terjadi gelombang pertama, kemudian *reverse-wave* pertama, kemudian gelombang kedua, dan seterusnya. Reverse-wave merupakan fenomena yang terjadi saat negara demokratis kembali mengimplementasikan pemerintahan otoriter. Ia mengatakan bahwa beberapa dari penyebab *reverse-wave* adalah rendahnya nilai demokrasi pada para elit dan masyarakat, penguasaan (*conquest*) dari pihak non-demokratis, dan pembatasan partisipasi dari *middle-class* atau *low-class* dalam sistem politik.

Selain itu, Huntington (1991: 21) juga telah mengamati beberapa hal yang menghambat demokratisasi, yaitu aspek politik, budaya, dan ekonomi. Selain itu, ia cenderung menggunakan aspek yang berfokus pada institusi, sistem pemerintahan, dan kondisi negara itu sendiri untuk mengamati demokratisasi dan perubahan rezim. Ia juga sering memberikan contoh demokratisasi yang disebabkan oleh institusi atau organisasi, dan dari negara lain.

Mengenai pengaruh pihak luar pada demokratisasi, Huntington (1991) sempat menjelaskan mengenai pengaruh pihak luar dalam demokratisasi. Pada sekitar tahun 80-an, Ia mengamati bahwa institusi European Community (EC) memiliki peran besar dalam mendemokratisasikan sebagian besar negara-negara Eropa, seperti Yunani, Spanyol, dan Portugal. Selain itu, melemahnya pengaruh Soviet pada negara-negara lain juga membantu mendorong demokratisasi (Huntington, 1991: 14). Dan pada tahun 90-an, demokrasi disebarkan melalui International Monetary Fund (IMF) dan World Bank dengan cara memberikan persyaratan

yang mendorong liberalisasi ekonomi dan demokrasi untuk mendapatkan bantuannya (Huntington, 1991: 17).

Salah satu contoh dari negara yang memainkan peran sebagai penyebar (*promoter*) demokratisasi pada tahun 70-an dan 80-an Amerika Serikat. Amerika Serikat telah berhasil menyebarkan demokrasi di berbagai negara di wilayah Amerika Selatan, Eropa, dan Asia Timur, dan Teluk Persia. Dan pada akhir tahun 80-an, Amerika Serikat dijadikan sebagai contoh internasional bagaimana wujud demokrasi dalam suatu negara (Huntington, 1991: 15). Huntington juga mengamati terdapat efek domino/*snowballing*, menekankan bahwa demokratisasi di negara satu dapat mempengaruhi proses demokratisasi di negara lain selama negara yang terpengaruhi melihat keunggulan pada demokrasi dan memiliki kondisi yang memungkinkan demokrasi untuk berkembang (Huntington, 1991: 16).

Teori Demokratisasi oleh McFaul (2002)

McFaul (2002) menggunakan pandangan yang berbeda dengan cara berfokus pada para aktor. Dari pandangan tersebut, McFaul (2002) mengatakan bahwa perubahan dari komunisme (*decommunization*) menciptakan dua hasil perubahan rezim, yaitu demokrasi dan pemerintahan diktator. Selain itu, McFaul (2002) juga mengatakan bahwa transisi tersebut dapat terwujud dengan lancar karena kekuatan pendukung dan pelawan yang tidak seimbang dalam perlawanan rezim; perubahan rezim ke arah demokratis disebabkan oleh dukungan yang lebih besar pada perubahan rezim demokratis, sedangkan perubahan ke pemerintahan diktator disebabkan oleh dukungan yang lebih besar pada perubahan rezim diktator (McFaul, 2002: 222-223). Dukungan dan kekuatan yang sama dari kedua belah pihak akan menyebabkan perubahan yang tidak sempurna dan rezim yang tidak stabil (McFaul, 2002: 213).

Pada bagian awal karyanya, McFaul (2002) mencatat beberapa perkiraan dari peneliti-peneliti demokratisasi *third wave*. Sebagian besar peneliti sebelumnya mengatakan bahwa perpindahan ke arah demokratis dapat terjadi jika terdapat kerjasama antara *soft-liners* dan aktor netral/penengah yang dapat menjadi landasan dan implementasi perubahan demokratis (McFaul, 2002: 216). Selain itu, perubahan demokrasi juga dapat terjadi jika dilakukan dengan cara kooperatif dengan membuat pakta atau persetujuan antara pendukung dan lawan perubahan. Agar kerjasama tersebut sukses, pakta yang dibuat harus memiliki pembatasan agenda yang jelas, memastikan kedua belah pihak mendapatkan keuntungan dari perubahan rezim, dan bahwa pembuatan pakta tersebut terbatas hanya pada para pemerintah (McFaul, 2002: 217-218). Tetapi McFaul sendiri mencatat bahwa pakta yang sukses dan kondisi-

kondisinya tidak dapat menjelaskan perubahan rezim, terutama dalam gelombang keempat demokratisasi (McFaul, 2002: 221-222).

Secara garis besar, McFaul menentang penelitian pada masa *third wave*, contohnya Huntington yang mengatakan bahwa “*negotiation and compromise among elites were at the heart of the democratization process*” (McFaul, 2002: 224). Ia mengatakan bahwa kelemahan dari penelitian masa *third-wave* adalah bahwa kasus-kasus transisi yang gagal tidak digunakan dalam penelitiannya (McFaul, 2002: 223). Berkat penelitian yang dilihat dari kekuatan dukungan gerakan, baik demokratis maupun diktator, penelitian mengenai demokratisasi lebih menjelaskan peristiwa perubahan rezim yang lebih realistis dan komprehensif.

McFaul (2002) mengatakan bahwa perubahan demokratis yang sukses dimulai dari gerakan revolusi dari para agen perubahan, bukan langsung dari pemerintahan. Hal tersebut dikarenakan jika dimulai dari pemerintah, maka justru akan terbentuk pemerintahan diktator (McFaul, 2002: 221) Dan juga, gerakan revolusi tersebut biasa dilakukan dengan cara non-kooperatif dan perlawanan pada rezim komunisme. McFaul (2002) juga sempat menyinggung sedikit mengenai pengaruh ‘Barat’ pada demokratisasi, mengatakan bahwa semakin dekat suatu negara dengan ‘Barat’, semakin memungkinkan untuk bertransisi ke demokrasi (McFaul, 2002: 241-242).

Berdasarkan teori dari Huntington (1991), Myanmar mengalami beberapa tantangan demokratisasi yang menghambat, bahkan memundurkan demokrasi pada saat melakukan transisi. Kemudian dari McFaul, telah terdapat perlawanan mengenai pergerakan transisi antara warga pro-demokrasi dan pemerintah Tatmadaw. Beberapa contoh dari perlawanan tersebut adalah dalam bentuk pemilu yang dimenangkan partai NLD, dan protes dari warga yang pro-demokrasi. Dalam kasus Myanmar, Myanmar telah mengalami proses demokratisasi dalam beberapa bagian. Tetapi setelah terjadinya proses kemajuan demokrasi, kudeta tahun 2021 memundurkan sebagian besar kemajuan demokratis sebelumnya. Tidak hanya demokratisasi mengalami kemunduran, Tatmadaw kembali mengambil alih pemerintahan Myanmar. Untuk menjaga kekuasaannya setelah kudeta, Tatmadaw juga menyelenggarakan *state of emergency* di Myanmar.

Mengingat waktu penelitian Huntington (1991) dan McFaul (2002), akan lebih baik jika memasukan Myanmar dalam gelombang demokratisasi keempat dari pandangan McFaul. Huntington berfokus pada gelombang ketiga demokrasi yang terjadi sekitar akhir abad ke 20. Sedangkan publikasi McFaul mengenai gelombang demokratisasi keempat mengkritik

penelitian pada *third wave* dan memberikan pandangan baru yang memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk dapat menjawab rumusan masalah yang telah dibuat. Transisi Myanmar yang dimaksud pada sebagian besar penelitian ini akan berfokus pada jangka waktu abad ke 21, setelah tahun 2000. Untuk menyesuaikan teori dan waktu fenomena, akan lebih baik jika menggunakan pandangan McFaul yang lebih baru untuk menjawab rumusan masalah.

PEMBAHASAN

Setelah kudeta 2021 terjadi, kemajuan dari transisi demokratis mengalami kemunduran. Rezim militer kembali mengambil alih kepemimpinan pemerintahan Myanmar dan demokratisasi yang telah diperjuangkan mengalami kemunduran di beberapa bagian. Negara Myanmar masih belum cukup stabil dalam menetapkan kemajuan demokrasi. Kemajuan-kemajuan yang disebut sebelumnya masih dapat mengalami kemunduran, terutama setelah kudeta 2021. Selain itu, pemerintah Myanmar dan Tatmadaw masih memiliki kekuasaan yang besar dalam perpolitikan. Tetapi warga dan dunia internasional ingin Myanmar untuk berdemokrasi.

Beberapa hal yang menghambat demokratisasi menurut Huntington juga muncul di Myanmar. Para elit masih belum ingin sepenuhnya mengimplementasikan demokrasi, penguasaan (*conquest*) dari pihak non-demokratis telah terjadi, dan pembatasan partisipasi dari *middle-class* atau *low-class* dalam sistem politik juga diimplementasikan karena terdapat intervensi pada pemilu. Seperti yang telah dijelaskan, para elit Tatmadaw telah menetapkan kekuasaannya, baik melalui konstitusi, maupun dengan kudeta dan penyelenggaraan *state of emergency*. Kemudian, perebutan kekuasaan yang telah terjadi juga telah menunjukkan kekuatan dan keinginan Tatmadaw untuk menetapkan kekuasaannya.

Selain itu, berdasarkan McFaul, transisi dari pemerintahan komunisme dapat menghasilkan pemerintahan demokrasi atau otoriter. Hal tersebut bergantung pada dorongan dari kedua pihak. Siapa yang lebih kuat akan menentukan apakah pemerintahan akan demokratis atau otoriter. Myanmar masih belum cukup stabil untuk sepenuhnya mengimplementasikan demokrasi karena masih dalam masa transisi dan perubahan yang terjadi masih dapat berubah ke arah yang non-demokratis. Yang berarti perubahan demokratis yang telah terwujud masih belum dapat menjamin demokrasi dalam jangka waktu panjang. Beberapa hal mengenai kekuasaan dan wewenang Tatmadaw telah ditetapkan dalam konstitusi 2008, seperti pada beberapa artikel yang tertera pada di bawah ini.

Tabel: Beberapa Artikel dalam Konstitusi 2008	
Nomor Artikel	Isi Artikel
6 (f)	Membolehkan bagan pertahanan untuk berpartisipasi dalam kepemimpinan politik negara.
14	<i>The Pyidaungsu Hluttaw, the Region Hluttaws and the State Hluttaws</i> memasukan bagan pertahanan sebagai representatif yang dinominasi oleh <i>Commander-in-Chief of the Defence Services</i> dengan jumlah yang telah disediakan dalam konstitusi

Selain itu, kudeta pada tahun 2021 telah mendemonstrasikan kekuatan yang dimiliki oleh Tatmadaw untuk menetapkan kekuasaannya dalam pemerintahan. Peristiwa tersebut, ditambah dengan beberapa amandemen yang terjadi pasca kudeta, semakin memperkuat Tatmadaw dalam perpolitikan Myanmar dengan cara memberikan lebih banyak wewenang.

Dari sisi Huntington dan pengamatan McFaul mengenai gelombang ketiga, BDF seharusnya berpotensi untuk membantu Myanmar dalam meningkatkan kemajuan transisi demokratis di Myanmar. BDF menggunakan cara yang kooperatif untuk membantu transisi demokrasi Myanmar; “*negotiation and compromise among elites were at the heart of the democratization process*” (McFaul, 2002: 224). Huntington mencatat bahwa pihak luar seperti organisasi internasional dan negara kuat memiliki potensi untuk mempengaruhi kemajuan transisi demokrasi. Kemudian berdasarkan pengamatan McFaul pada gelombang ketiga demokratisasi, transisi demokratis dapat terjadi jika dilakukan dengan cara kooperatif dengan membuat pakta atau persetujuan antara pendukung dan lawan perubahan. Dalam kata lain, cara kooperatif memiliki potensi dan apa yang dilakukan BDF dapat mendorong transisi demokratis di Myanmar. Jalur kooperatif yang dilakukan BDF telah berhasil untuk mengajak Myanmar untuk mengikuti diskusi selama bertahun-tahun, berbeda dengan jalur barat yang memberikan sanksi dan isolasi. Selain itu, kerjasama dan diskusi dengan negara-negara anggota BDF lainnya juga telah memberikan informasi mengenai kemajuan demokratis yang dialami negara lain.

Tetapi, McFaul pernah mengatakan bahwa pandangan dari gelombang ketiga tidak dapat menjelaskan perubahan rezim, terutama dalam masa gelombang keempat demokratisasi (McFaul, 2002: 221-222). Hal ini dibuktikan dengan Myanmar yang masih belum demokratis walaupun telah sering mengikuti diskusi BDF. Dan juga, penelitian demokratisasi *third wave* dari Huntington berfokus pada periode abad ke 20, sebelum tahun 2000. Sedangkan penelitian

McFaul mengkritik penelitian *third wave* dan memberikan pandangan baru pada transisi demokratis. Dan juga pembentukan BDF pada tahun 2008, dan kudeta 2021, kurang cocok untuk dimasukkan dalam masa transisi demokratisasi *third wave* dan akan lebih baik jika menggunakan teori yang lebih baru untuk meneliti hal-hal tersebut.

Karena itu, pengamatan McFaul mengenai gelombang keempat demokratisasi dapat digunakan untuk menjelaskan kegagalan BDF. McFaul mengatakan bahwa hasil dari transisi berasal dari dua pihak yang memiliki kekuatan yang tidak seimbang (McFaul, 2002: 222). Peraduan dari kekuatan tersebut akan membuahkan hasil yang menentukan transisi yang demokratis atau otoriter berdasarkan dorongan yang lebih kuat. Jika dibandingkan antara BDF dan para elit Tatmadaw, Tatmadaw memiliki pengaruh yang lebih besar pada transisi pemerintahan Myanmar. Tidak hanya Tatmadaw berurusan langsung dengan pemerintahan Myanmar, ia juga telah menetapkan kekuasaannya melalui konstitusi dan kudeta.

Jika membandingkan kontribusi pihak pada transisi, Tatmadaw memiliki keunggulan dalam hal ini. Berdasarkan beberapa contoh intervensi yang telah disebutkan sebelumnya, Tatmadaw memiliki kekuasaan dan wewenang yang lebih besar dalam menentukan jalannya transisi rezim di Myanmar. Sedangkan BDF sendiri tidak dapat memastikan bahwa demokrasi merupakan cara yang efektif untuk menjalankan pemerintahan pada masing-masing negara anggota. Selain itu, BDF hanya dapat mempercayakan setiap negara anggota bahwa masing-masing mengetahui apa yang terbaik bagi negaranya. Hal tersebut sejalan dengan kepercayaan BDF bahwa demokrasi harus berdasarkan kemauan sendiri, bukan dari paksaan pihak luar: *“Democracy should be home-grown and through national consensus, enabling external environment will strengthen democracy at national and regional settings.”* (BDF, 2017)

McFaul juga mengatakan bahwa jika transisi diimplementasikan dari ‘atas’ (para elit) maka akan menyebabkan transisi yang bersifat otoriter. Melihat di Bab 2, beberapa rencana transisi demokratis yang diimplementasi, seperti rencana Seven-Step Roadmap to Discipline-Flourishing Democracy, pelonggaran pers, struktur hukum tanpa militer, dan pemilu yang dijanjikan pada tahun 1990 (Tonkin, 2007:34), telah direncanakan oleh pemerintah. Karena Tatmadaw telah melakukan banyak intervensi dalam transisi demokratis, dapat dikatakan bahwa Tatmadaw memiliki peran yang lebih besar dalam transisi rezim, baik demokratis maupun non-demokratis. Kembali pada teori McFaul, transisi dari para elit pemerintahan akan mewujudkan pemerintahan yang otoriter atau diktator. Hal ini membuka kemungkinan bahwa fenomena yang dijelaskan McFaul juga terjadi di Myanmar.

Kemudian jika dilihat dari teori McFaul, rekomendasi dan diskusi yang diberikan BDF kurang efektif dalam mendorong transisi rezim yang demokratis, Hal tersebut karena beberapa rekomendasi dan hasil diskusi dari BDF dipandang dari perspektif *top-down*, yang berarti ditujukan atau lebih cocok untuk diimplementasi oleh para pemerintah, bukan pada warga. McFaul merekomendasikan bahwa transisi demokratis dimulai dari warga, karena jika dimulai dari atas akan menghasilkan transisi yang mengarah pada pemerintahan diktator. Berikut adalah beberapa contoh dari rekomendasi yang terbuat setelah pertemuan BDF 15 pada tanggal 8 Desember 2022:

(1) The global institutions must close the gap of being distant from the current global reality and the people's lives by being more representative, accountable, and transparent, thus will stop undermining the core values of democracy being upheld at the regional and national levels. (2) Addressing the corrosive influence of misinformation and disinformation by working together to strengthen the resilience of democratic institutions and civil society. (3) Utilizes universities to reach out to youth and other institutions that support freedom of thought and debate and foster critical thinking (4) More studies to understand what drives democratic decline from top to bottom, including finding a way to build the middle ground by also understanding the voice of extremism that is corrosive to democracy. (5) To make a conscientious effort to promote democracy by not only preaching by continue practicing democratic norms and delivering to the people. (6) Improve practical cooperation, sharing experiences, and best practices, including through the BDF, are needed by countries aspiring to democracy (BDF, 2022)

Beberapa dari rekomendasi tersebut mungkin dapat didorong oleh warga, tetapi implementasi konkrit rekomendasi tetap bergantung pada pemerintah dari masing-masing negara. Dengan Tatmadaw sebagai pihak politik yang dominan di Myanmar, Tatmadaw akan memiliki wewenang yang lebih besar untuk mempertimbangkan rekomendasi dari BDF. Khanisa Krisman mengatakan bahwa demokrasi di Myanmar dilakukan secara *top-down* dengan Tatmadaw sebagai pihak yang dominan (dalam Rahman, 2017). Ia juga mengatakan bahwa demokratisasi tersebut harus dipertanyakan, yang sejalan dengan yang dikatakan McFaul mengenai mulainya titik awal transisi rezim.

Tetapi menurut Khanisa Krisman sebagai Koordinator Tim Kajian ASEAN Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2017, signifikansi dari BDF juga akan berbeda dari

sudut pandang tertentu. Dari sudut pandang Myanmar, BDF memiliki pengaruh yang kecil, sedangkan dari sudut pandang BDF, terdapat perubahan yang signifikan (dalam Rahman, 2017). Selain itu, dengan tidak mengundang Myanmar pada pertemuan BDF tahun 2021 dan 2022, terdapat pertanyaan baru mengenai pelaksanaan tujuan dan signifikansi Myanmar bagi BDF untuk menyebarkan demokrasi, terutama di Asia.

KESIMPULAN

Secara singkat, pengaruh dari BDF pada transisi demokratis kurang terwujud di Myanmar. Hal tersebut terjawab dengan menggunakan teori demokratisasi dari Darren Hawkins dan bantuan dari teori demokratisasi oleh Huntington dan McFaul. Berdasarkan teori-teori tersebut, pengaruh dari BDF belum terwujud karena sebagian besar saran yang diberikan oleh BDF ditargetkan pada pemerintah dan bukan pada warga. McFaul tidak merekomendasikan untuk memulai transisi dari pemerintahan karena akan menyebabkan transisi yang justru bersifat otoriter. Hal tersebut diperburuk dengan BDF memberikan rekomendasi yang disarankan pada para pemerintah yang tidak demokratis karena akan menghambat transisi demokratis.

Selain itu, Tatmadaw sebagai pihak non-demokratis memiliki pengaruh yang lebih besar dibanding BDF dalam mempengaruhi hasil transisi rezim. Beberapa penghambat demokratisasi seperti para elit Tatmadaw belum ingin sepenuhnya mengimplementasikan demokrasi, penguasaan (*conquest*) dari pihak non-demokratis dalam bentuk kudeta, dan partisipasi dari *middle-class* atau *low-class* belum dapat diterima oleh pemerintah Myanmar, telah terjadi dan mempengaruhi transisi rezim di Myanmar. Bahkan sebelum perubahan pasca kudeta, kekuasaan Tatmadaw telah terbukti dan terjaga, baik secara tertulis di konstitusi, maupun melalui kudeta dan penyelenggaraan *State of Emergency*. Tatmadaw telah terlibat dalam perpolitikan Myanmar sejak kudeta tahun 1962. Kemudian dalam konstitusi 2008, keterlibatan pihak militer dalam perpolitikan Myanmar telah ditetapkan. Seperti yang telah terjadi pada kudeta tahun 2021, Tatmadaw masih berperan dalam politik saat *State of Emergency*.

Dan juga, kondisi di Myanmar juga masih kurang stabil untuk mendirikan demokrasi dalam jangka panjang karena masih dapat berarah ke transisi non-demokratis. Pada masa transisi rezim, Myanmar telah mencoba untuk melakukan transisi demokratis di berbagai aspek, tetapi sebagian besar dari perubahan-perubahan tersebut tidak bertahan lama, terutama setelah terjadinya kudeta 2021. Beberapa perubahan demokratis yang terjadi juga datang dari pemerintah, menandakan bahwa transisi yang datang dari 'atas'. Dikombinasikan dengan

transisi tersebut direncanakan dari pemerintah yang memiliki pihak non-demokratis yang dominan, transisi yang demokratis akan sulit untuk terwujud.

Karena BDF memberikan rekomendasi untuk pemerintah, Tatmadaw memiliki pengaruh yang besar sebagai pihak non-demokratis, dan Myanmar masih belum cukup stabil untuk menetapkan transisi demokratis, rekomendasi dari BDF belum dapat mendorong dan mewujudkan transisi demokrasi di Myanmar.

REFERENSI

Aryani, Nabilla Syahaya Putri. (2019). Constructive Engagement as Indonesia's Foreign Policy Strategy in Promoting Democratization in Myanmar. *Indonesian Journal of International Relations*, 3(2). <https://journal.aihii.or.id/index.php/ijir/article/view/84>

Barany, Zoltan. (2019). The Rohingya Predicament. Why Myanmar's Army Gets Away with Ethnic Cleansing. *Istituto Affari Internazionali (IAI)*. <https://www.jstor.org/stable/resrep19683>

BDF. (Tanpa Tahun). *Why BDF*. Dalam <https://bdf.kemlu.go.id/why-bdf>. Diunduh pada tanggal 22 November 2022

BDF. (2017). Does Democracy Deliver?

BDF. (2022). 15th BALI DEMOCRACY FORUM Nusa Dua, Bali, 8 December 2022 Key Elements

Bünthe, Marco. (2011). Burma's Transition to "Disciplined Democracy": Abdication or Institutionalization of Military Rule?. *GIGA Research Programme: Legitimacy and Efficiency of Political Systems*. <https://www.jstor.org/stable/resrep07514>

Cheak, Paul Seck Fai. (2008). ASEAN's Constructive Engagement Policy Toward Myanmar (Burma). *Tesis*. U.S. Army Command and General Staff College

Comply Advantage. (Tanpa Tahun). *Myanmar Sanctions: What You Need To Know*. Dalam <https://complyadvantage.com/insights/myanmar-sanctions/>. (Diunduh pada tanggal 5 April 2022)

Dahl, Robert A. (1971). *Polyarchy: Participation and Opposition*. New Haven dan London: Yale University Press

Dahl, Robert A. (1989). *Democracy and Its Critics*. Yale University Press

Downes, Alexander B. dan Montén, Jonathan. (2013). Forced to Be Free?: Why Foreign-Imposed Regime Change Rarely Leads to Democratization. *International Security*, 37(4). <https://www.jstor.org/stable/24480621>

Giri, Ananta K. (1996). Democratic Transition and Challenge of Transformation, *Economic and Political Weekly*, 31(32). <https://www.jstor.org/stable/4404498>

Hawkins, Darren. (2001). Democratization Theory and Nontransitions: Insights from Cuba. *Comparative Politics*, 33(4). <https://doi.org/10.2307/422443>

- Huntington, Samuel P. (1991). Democracy's Third Wave, *Journal of Democracy*, 2(2)
- McAuliffe, Erin. (2014). ASEAN's Role in the Democratization of Burma: An Analysis of Burma's Transition and the use of ASEAN by International Actors to produce liberal change in the former "Rogue State". *Tesis*. The Ohio State University
- McFaul, Michael. (2002). The Fourth Wave of Democracy and Dictatorship: Noncooperative Transitions in the Postcommunist World. *World Politics*, 54(2). <https://www.jstor.org/stable/25054183>
- Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Politico Magazine. (2014). *The Ex-Pariah*. Dalam <https://www.politico.com/magazine/story/2014/02/myanmar-the-ex-pariah-103887/>. Diunduh pada tanggal 5 April 2022
- Rahman, Vanny El. (2017). Pengaruh Bali Democracy Forum, Terhadap Transisi Demokrasi Periode 2012-2014. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif
- Remmer, K. (1991). New Wine or Old Bottlenecks? The Study of Latin American Democracy. *Comparative Politics*, 23(4). <https://doi.org/10.2307/422261>
- Republika. (2016). *Hassan Wirajuda, Pendiri dan Pembina Bali Democracy Forum: Demokrasi tak Bisa Dipaksakan*. Dalam <https://republika.co.id/amp/o1ym473>. Diunduh pada tanggal 27 Desember 2021
- The New York Times. (2021). *Myanmar's Coup and Violence, Explained*. Dalam <https://www.nytimes.com/article/myanmar-news-protests-coup.html>. Diunduh pada tanggal 9 Maret 2022
- Tempo. (2021). *Indonesia Tak Undang Myanmar ke Bali Democracy Forum, Ini Sebabnya*. Dalam <https://dunia.tempo.co/read/1536493/indonesia-tak-undang-myanmar-ke-bali-democracy-forum-ini-sebabnya/full&view=ok>. Diunduh pada tanggal 12 Desember 2021
- Tonkin, Derek. (2007). The 1990 Elections in Myanmar: Broken Promises or a Failure of Communication?. *Contemporary Southeast Asia*, 29(1), pp.33-54. <https://www.jstor.org/stable/25798813>
- Wirartha, I Made. (2006) *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset